

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan Multinasional atau Multi National Corporation (MNC) adalah perusahaan yang menjalankan usahanya tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga melintasi batas-batas negara dan politik. Perusahaan semacam ini juga sering disebut sebagai perusahaan transnasional (transnasional corporation atau TNC).

Perusahaan Multinasional tidak semuanya sejenis. Mereka sangat beraneka ragam, baik dari segi ukuran maupun sifat usaha mereka. Perusahaan Multinasional yang bergerak dalam bisnis ekstraktif memiliki perilaku dan dampak yang berbeda dengan perusahaan multinasional yang membuat barang kapital, yang pada gilirannya juga berbeda dengan perusahaan multinasional yang menghasilkan barang konsumsi.

Dari sudut pandang tuan rumah, masing-masing tipe perusahaan multinasional itu menjanjikan keuntungan dan kerugian berbeda-beda. Misalnya, negara tuan rumah cenderung menilai penanaman modal asing langsung di sektor industri ekstraktif cenderung lebih eksploitatif dibanding dengan investasi di bidang manufaktur. Tetapi sebaliknya, investasi di sektor ekstraktif bisa mendatangkan sejumlah besar kapital bagi negara tuan rumah untuk membiayai upaya penyedotan sumber alam yang memang sangat mahal. Perusahaan Multnasional ekstraktif juga cenderung menekankan perbedaan antara perusahaan dengan tuan rumah, karena mereka kadang cenderung menomorduakan

kepentingan negara tuan rumah, dan lebih mementingkan kepentingan negara induk.¹

Perusahaan Multinasional telah memainkan peranan yang sangat penting dalam konstelasi ekonomi-politik baik di tingkat nasional maupun internasional. Di negara-negara berkembang, hampir setiap aspek kehidupan komunitas telah terkena dampak dari operasi Perusahaan Multinasional. Demikian juga dengan PT Freeport yang mulai beroperasi di Indonesia sejak April 1965. Kehadiran PT Freeport telah memberikan dampak yang cukup besar dalam pembangunan Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatif dari operasi Perusahaan Multinasional di negara berkembang seperti Indonesia, telah menarik banyak perhatian perihal pertanggungjawaban dari korporasi. Debat mengenai pertanggungjawaban korporasi telah berkembang seiring dengan meningkatnya persoalan-persoalan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Isu-isu muncul melalui konsep pertanggungjawaban perusahaan yang muncul dari persoalan yang berbeda, meliputi etis, legal, ekonomi, dan politik.

Perusahaan multinasional kebanyakan tidak pernah ditekan untuk bertindak dengan pendekatan yang bertanggungjawab secara sosial di banyak negara, dimana aturan hukum itu sendiri sangat lemah dan kebanyakan pemerintah tidak sanggup atau tidak punya kemauan untuk memperkuat standar-standar itu. Kita sangat tidak mungkin berharap bahwa Perusahaan Multinasional akan beroperasi dengan pendekatan yang bertanggungjawab ketika mereka berhubungan dengan kebanyakan pemerintah yang tidak demokratis.

¹ Pieter Kuin, *Perusahaan Trans Nasional* (Jakarta: Gramedia, 1987), 57

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh korporasi besar, khususnya di sektor industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan lainnya), saat ini sedang disorot tajam. Kasus Freeport adalah contoh terbaru--bukan terakhir--tentang bagaimana realisasi tanggung jawab sosial itu. Ini sekaligus menelaah praktek CSR yang berkaitan dengan peran aktif masyarakat sipil dalam memaknai dan turut membentuk konsep kemitraan yang merupakan salah satu kondisi yang dibutuhkan dalam mewujudkan CSR.

Hamann dan Acutt (2003), dalam artikel "*How Should Civil Society (and The Government) Respond to 'Corporate Social Responsibility?'*" menelaah motivasi yang mendasari kalangan bisnis menerima konsep CSR. Ada dua motivasi utama. Pertama, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superficial, dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Singkatnya, realisasi CSR yang bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya.²

Kedua, legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk mendampaki wacana. Pertanyaan-pertanyaan absah apakah yang dapat diajukan terhadap perilaku korporasi, serta jawaban-jawaban apa yang mungkin diberikan dan terbuka untuk diskusi? Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi ini berargumentasi wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan, lebih khusus, kiprah para korporasi raksasa.

² Revisond Baswir, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan* (Yogyakarta: IDEA & Pustaka Pelajar, 1999), 60.

Telaah Hamann dan Acutt sangat relevan dengan situasi implementasi CSR di Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam kondisi keragaman pengertian konsep dan penjabarannya dalam program-program berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keragaman pengertian konsep CSR adalah akibat logis dari sifat pelaksanaannya yang berdasarkan prinsip kesukarelaan. Tidak ada konsep baku yang dapat dianggap sebagai acuan pokok, baik di tingkat global maupun lokal. Secara internasional saat ini tercatat sejumlah inisiatif *code of conduct* implementasi CSR. Inisiatif itu diusulkan, baik oleh organisasi internasional independen (Sullivan Principles, Global Reporting Initiative), organisasi negara (Organization for Economic Cooperation and Development), juga organisasi nonpemerintah (Caux Roundtables), dan lain-lain.

Di Indonesia, acuannya belum ada. Bahkan peraturan tentang pembangunan komunitas (*community development/CD*) saat ini masih dalam bentuk draft yang diajukan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Tak heran jika berbagai korporasi sebenarnya berada dalam situasi "bingung" untuk melaksanakan CSR.

Selain gambaran itu, tampak pula kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia yang sangat tergantung pada *chief executive officer* (CEO) korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak otomatis selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika CEO memiliki kesadaran moral bisnis berwajah manusiawi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang layak. Sebaliknya, jika orientasi CEO-nya hanya pada kepentingan kepuasan pemegang

saham (produktivitas tinggi, *profit* besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR sekadar kosmetik.

Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi.

Secara teoretis CSR mengasumsikan korporasi sebagai agen pembangunan yang penting, khususnya dalam hubungan dengan pihak pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Dengan menggunakan alur pemikiran motivasi dasar, berbagai *stakeholder* kunci dapat memantau, bahkan menciptakan tekanan eksternal yang bisa "memaksa" korporasi mewujudkan konsep dan penjabaran CSR yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia, yang notabene hanya mengandalkan pembangunan ekonomi pada prakteknya. Dalam melaksanakan pembangunan, negara Negara berkembang kemudian mengadopsi paradigma ekonomi pembangunan.³ Sebuah paradigma yang selalu menuntut adanya investasi dan akumulasi capital dalam jumlah yang besar untuk menggerakkan roda pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah upaya akumulasi capital, yang keberhasilannya diukur dengan produk nasional bruto, dalam proses itu, semua

³ Paradigma tersebut memunculkan isu pembangunanisme (developmentalism), yang ternyata hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur (yang berbasis pada hutang luar negeri) tanpa diikuti dengan penataan struktur ekonomi yang solid di negara-negara dunia ketiga, sehingga lebih banyak menjerumuskan negara dunia ketiga dalam hutang luar negeri yang berkepanjangan.

yang membantu akumulasi capital harus digalakkan, *yang tidak membantu dipersilahkan minggir*.⁴

Dan konsekwensi dari paradigma ekonomi pembangunan adalah masuknya investasi asing/capital flows dari luar negeri serta perusahaan multinasional secara bebas dan besar-besaran dalam struktur pembangunan ekonomi di negara berkembang.⁵

Model pembangunan ekonomi konvensional yang bertumpu pada pertumbuhan nampaknya menghasilkan dampak yang tak terduga. Karena itu, ada banyak alasan mengapa Pembangunan Berkelanjutan perlu diterapkan di Indonesia.⁶

Pertama, titik perhatian pembangunan hanya terpusat pada pertumbuhan ternyata berdampak negatif dilihat dari konteks totalitas pembangunan itu sendiri. Hal ini merupakan dampak dari pemahaman ilmu ekonomi yang konvensional. Sumberdaya alam rusak terkuras untuk tujuan ekspor, mencapai perolehan devisa yang besar, serta untuk membayar utang. Kerusakan lingkungan tidak dihitung sebagai biaya dari pembangunan ekonomi itu sendiri.

Kedua, model konvensional pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan sumberdaya alam terpakai menyebabkan depresiasi sumberdaya alam. Aset lingkungan semakin menurun dalam kualitas dan kuantitasnya kerana dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi konvensional miskin konsep dan analisis teori yang dapat menjaga dan

⁴ Revrison Baswir, *ibid*, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan* (Yogyakarta: IDEA & Pustaka Pelajar, 1999), 8.

⁵ Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 4-7.

⁶ Gert Thoma, *Sustainable Development Model* (Jakarta: SPES-LP3ES and FNS, 1989), 1-2.

menyelamatkan lingkungan. Bahkan alam rusak karena dieksploitasi diluar batas daya dukungnya untuk pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, kekacauan siklus ekologi potensial terjadi di kawasan dimana pembangunan dilaksanakan. Ini merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pembangunan model konvensional, yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan menciptakan kerusakan ekologi karena dampak teori kepuasan manusia tanpa batas.

Keempat, ada masalah-masalah sosial yang muncul sebagai akibat sampingan dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, pengangguran, kesenjangan sosial dsb. Semua masalah ini umum terjadi dalam pembangunan ekonomi yang bersifat konvensional.

Kelima, konsentrasi kekuasaan (power), modal, dan teknologi hanya terjadi pada kelompok-kelompok yang mapan di perkotaan. Kelompok ini memiliki daya beli lebih tinggi, sehingga semakin lebar disparitasnya dengan golongan bawah di pedesaan.

Keenam, model pembangunan ekonomi konvensional kurang memperhatikan aspek pertumbuhan yang bersifat kualitatif. Aspek pertumbuhan hanya dihitung secara agregat tanpa melihat golongan mana yang lebih sejahtera dan golongan mana yang tidak. Kini sudah mulai muncul banyak konsep yang menghitung pertumbuhan yang berkualitas dengan indikator-indikator sosial, lingkungan, sumberdaya manusia, dsb.

Ketujuh, pendekatan kebijakan pembangunan yang konvensional terlalu bersifat dari atas ke bawah (top down). Pendekatan yang bersifat partisipatif

kurang dipertimbangkan dan memang tidak ada pola yang khusus mengarahkan ke arah pendekatan tersebut.

Dan kenyataan di lapangan adalah kondisi pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya berkelanjutan, terutama di daerah pertambangan yang banyak memanfaatkan sumberdaya alam tak terbarukan. Contoh kasus yang paling mencolok adalah Freeport, Papua. Jika kita mencermati dari segi lingkungan, aktivitas yang dilakukan perusahaan tambang ini telah menimbulkan dampak sebagai berikut :⁷

1. Freeport telah melanggar sejumlah ketentuan hukum yang terkait dengan kelalaian dalam pengelolaan limbah batuan, longsor berulang pada limbah batuan Danau Wanagon yang berujung, dan keluarnya limbah beracun yang tak terkendali pada tahun 2000.
2. Freeport tidak membangun bendungan penampungan tailing yang sesuai dengan standar teknis legal untuk bendungan, namun masih menggunakan tanggul (levee) yang tidak cukup kuat. Selain itu Freeport mengandalkan izin yang cacat hukum dari pegawai pemerintah setempat untuk menggunakan sistem sungai dataran tinggi untuk memindahkan tailing.
3. Freeport mencemari sistem sungai dan lingkungan muara sungai, yang melanggar standar baku mutu air sepanjang tahun 2004 hingga 2006. Dan yang tidak kalah parah adalah membuang Air Asam Batuan (Acid Rock Drainage) tanpa memiliki surat izin limbah bahan berbahaya beracun.

⁷ Dalam artikel "WALHI Menggugat Freeport Indonesia: Peringatan Bagi Manipulator Informasi", Tabloid Semanggi, 3 Agustus 2000

Buangan Air Asam Batuan sudah sampai pada tingkatan yang melanggar standar limbah cair industri, membahayakan air tanah, dan gagal membangun pos-pos pemantauan.

4. Kandungan logam berat tembaga (Cu) yang melampaui ambang batas yang diperkenankan. Kandungan tembaga terlarut dalam efluent air limbah Freeport yang dilepaskan ke sungai maupun ke Muara Sungai Ajkwa 2 kali lipat dari ambang yang diperkenankan. Sementara itu untuk kandungan padatan tersuspensi (Total Suspended Solid) yang dibuang 25 kali lipat dari yang diperkenankan.
5. Sistem pembuangan limbah Freeport mengancam mata rantai makanan yang terindikasi kewat kandungan logam berat yaitu selenium (Se), timbal (Pb), arsenik (As), seng (Zn), mangan (Mn), dan tembaga (Cu) pada sejumlah spesies kunci yaitu: burung raja udang, maleo, dan kausari serta sejumlah mamalia yang kadangkala dikonsumsi penduduk setempat.
6. Sistem pembuangan limbah Freeport menghancurkan habitat muara sungai Ajkwa secara signifikan. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan kekeruhan muara dan tersumbatnya aliran ke muara. Dalam jangka panjang wilayah muara seluas 21 sampai 63 kilo meter persegi akan rusak.
7. Sedimentasi yang terjadi di Muara mengancam wilayah Taman Nasional Lorentz terutama di daerah pesisir. Ancaman pokok selain limbah adalah kontaminasi logam berat pada tumbuhan bakau dan spesies-spesies yang ada di pesisir Taman Nasional Lorentz.

8. Kawasan ADA (Ajkwa Deposition Area) seluas 230 km persegi yang telah mengalami kematian tumbuhan akibat tailing takkan pernah bisa kembali ke komposisi spesies semula meski pembuangan tailing berhenti. Diperlukan intervensi teknologi irigasi yang rumit dan asupan pupuk, kompos atau tanah subur yang luar biasa banyaknya untuk bisa membuat kawasan ini bisa ditanami kembali.

Lain lagi jika kita melihat dari sudut sosial-ekonominya. Keberadaan perusahaan tambang tersebut membawa dampak yang sangat signifikan bagi pendapatan Papua. Produk Domestik Bruto (PDB) Papua memang nomor tiga seluruh Indonesia, tetapi tingkat kesejahteraan Papua ada di posisi ke-29 dari seluruh propinsi yang kini ada. Hal ini menunjukkan belum meratanya pendapatan di masyarakat. PDB Papua sebagian besar disumbang dari pendapatan Freeport yang sangat tinggi (tahun 2004 profit nettonya sebesar US\$ 934 million atau 9,34 triliun rupiah). Keuntungan besar yang diperoleh dari operasional Freeport ternyata tidak sebanding dengan kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Masih banyak penduduk sekitar pertambangan tidak dapat menikmati hasil tersebut, bahkan sebagian besar mereka masih berada di bawah garis kemiskinan dan mengalami gizi buruk.⁸

Namun sepertinya pemerintah Indonesia tidak begitu peduli dalam menangani kasus tersebut. Pembangunan Berkelanjutan yang ingin kita raih pun sepertinya tidak dapat dengan mudah kita laksanakan. Perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

⁸ Maisya Farhati, *Jangan Pergi Papua*, (diakses tanggal 27 April 2007); melalui <http://legasi.blogspot.com/2006/12/jangan-pergi-papua.html>

Perusahaan Multinasional itu sendiri (Freeport). Dalam hal ini, Freeport juga diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar operasi pertambangannya, karena Pembangunan Berkelanjutan bukan hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kelestarian lingkungan.

Jadi, satu bahasan yang akan kita kemukakan dalam tulisan ini adalah mengenai implementasi tanggung jawab sosial (CSR-Corporate Social Responsibility) Freeport di Papua.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, setidaknya telah memberikan gambaran singkat tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh Freeport, sehingga memunculkan pula wacana mengenai Pertanggungjawaban Korporasi di Papua.

Maka permasalahan pokok yang coba dikemukakan dalam penulisan ini adalah : **Bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport di Papua?**

C. Tujuan Penulisan

Secara garis besar, ada tiga tujuan dari penulisan ini:

1. Mendeskripsikan bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport di Papua.
2. Mengaplikasikan teori-teori yang diterima oleh penulis.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Teori

Guna mendapatkan hubungan yang sesuai atas penulisan skripsi ini, maka diperlukan beberapa teori yang dapat mendukung dan memberikan gambaran sederhana dan jelas tentang isi dari skripsi ini, antara lain:

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development)

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan"⁹

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Pembangunan berkelanjutan menuntut masyarakat agar memenuhi kebutuhan manusia dengan meningkatkan potensi produktif melalui cara-cara yang ramah lingkungan, maupun dengan menjamin tersedianya peluang yang adil bagi semua pihak

⁹ Tim A+, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (di akses 20 oktober 2007); didapat dari www.csriindonesia.com/info/pemb-lanjut-ind.php

(WCED, 1987). Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan mengidentifikasi aspek-aspek ekologi, ekonomi dan sosial sebagai tiga tiang pembangunan berkelanjutan yang harus dihadapi secara holistik (WSSD, 2002). Oleh karena sesungguhnya kekayaan suatu bangsa adalah rakyatnya, tujuan dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memberdayakan rakyat untuk menikmati hidup yang panjang, sehat dan kreatif (UNDP, 1999)¹⁰

Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

2. Konsep Corporate Sosial Responsibility (CSR)

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai berikut :

¹⁰ *ibid.*

“CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”

Dalam bahasa sederhana, CSR berarti perusahaan/korporasi harus bertanggung jawab terhadap dampak-dampaknya pada aspek ekonomi/pasar, sosial dan lingkungan hidup (*Tripple Bottomline*); menjadi “tetangga yang baik” dengan memberikan maslahat (*good cause*) kepada masyarakat dan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) menyumbang pada aspek pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

CSR juga berarti kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional.

Pada saat banyak perusahaan semakin besar dan semakin kaya, pada saat itu pula semakin banyak orang miskin dan semakin rusak lingkungan sekitarnya.¹¹ Kekuasaan dan penguasaan atas sumberdaya alam serta kekayaan ada di tangan perusahaan multinasional yang bisa mendikte negara lain (baik negara maju ataupun negara miskin) sehingga

¹¹ Tony Djogo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (diakses tanggal 15 Juni 2007); melalui Beritabumi.or.id/artikel/tanggung-jawab-sosial./13=

negara tertentu bisa kehilangan kedaulatan atas sumberdaya alam bahkan kehilangan kebebasan dan kedaulatan negaranya serta meningkatkan eksploitasi tenaga kerja dan turut memperbesar degradasi sumberdaya alam. Karena itu, muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negative tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan social dan ekonomi tetapi juga dalam hal lingkungan hidup.

Menurut Bank Dunia, Tanggung jawab social perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan.¹² Namun sejauh ini, kebijakan pemerintah untuk mendorong dan mewajibkan perusahaan (terutama yang memiliki kontribusi besar dalam perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pemutusan hubungan secara sepihak, sering berkuasa dan bertahan dengan tetap menerima kredit dari perusahaan-perusahaan keuangan yang kuat dan berkuasa di dunia) untuk menjalankan tanggung jawab social ini tidak begitu jelas.

Dengan mengacu pada dua konsep diatas maka dapat kita temukan sebuah hipotesa, karena dalam hal ini berarti bahwa Freeport juga dituntut untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan di

¹² The World Bank Institute, *The Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Program*, Learning Materials, 2005.

sekitar operasi pertambangannya, karena Pembangunan Berkelanjutan bukan hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kelestarian lingkungan.

E. Hipotesa

Rangkaian latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di depan serta kerangka teoretik yang coba ditawarkan dalam penulisan ini, telah mendorong penulis untuk merumuskan hipotesa sebagai berikut:

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport di Papua tidak seluruhnya sesuai dengan tuntutan yang diajukan masyarakat sekitar tambang - Papua.

F. Jangkauan Penulisan

Batasan waktu penulisan sangat penting ditetapkan agar kajian ini bisa lebih terfokus. Dengan alasan tersebut, penulis menetapkan batasan waktu sejak tahun 2005 (awal mula diadakan *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA), sebuah penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR) hingga saat ini (2008).

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu melakukan penelitian perpustakaan (Library Research) atau lebih dikenal dengan sebutan studi pustaka. Penulis mengacu pada beberapa literatur, download internet, majalah, koran, jurnal, dan artikel lain yang berhubungan dengan tema skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini direncanakan terdiri dari 5(lima) bab, masing-masing bab mengetengahkan persoalan berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penulisan, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Mencoba menceritakan tentang kondisi pertambangan dan investasi di Indonesia, bagaimana pemerintah menangani masalah investasi pertambangan di Indonesia, sampai dengan keberadaan Freeport dan aktor-aktor yang terlibat dalam operasional Freeport sebagai salah satu Multinational Company yang telah lama berinvestasi, mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang/ kekayaan alam Indonesia..

BAB III Membahas masalah pembangunan masyarakat di sekitar pertambangan Freeport, terutama sejak dibentuknya Otonomi Khusus Papua. Selain itu dijelaskan pula mengenai dampak sosial-ekonomi-lingkungan PT Freeport bagi masyarakat sekitar tambang (Papua) yang pada akhirnya menuntut adanya pertanggungjawaban sosial perusahaan/ Corporate Social Responsibility oleh PT. Freeport

BAB IV diberi topik mengenai Implementasi CSR PT Freeport di Papua, yang berawal dari dinamika CSR di Indonesia (bagaimana awal mula, ruang lingkup, aturan hukum dan pelaksanaanya), dilanjutkan dengan reaksi rakyat Papua atas Operasional PT. Freeport, serta program-program sosial dan dana bantuan yang dikeluarkan Freeport (sebagai bentuk CSR terhadap rakyat

Papua). Untuk lebih menguatkan argumen dalam penulisan ini, maka dalam bab ini akan dipaparkan pula opini dari beberapa LSM mengenai implementasi CSR PT Freeport.

BAB V adalah kesimpulan yang tersusun dari tiap-tiap bab dalam penulisan ini. Kesimpulan akhir ini juga tanpa disertai dengan saran-saran, mengingat tulisan ini adalah deskripsi yang disertai dengan argumen yang mendukung.